

TESIS

**STUDI PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP
KINERJA MELALUI EFISIENSI PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
ENREKANG**



AFANDI NUR, S.TP

P022201020

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

**STUDI PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP
KINERJA MELALUI EFISIENSI PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
ENREKANG**

Study Of The Effect Of E-Procurement Application On Performance
Through The Efficiency Of Construction Work Procurement In The Public
Works Service Of Enrekang District

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah / Otonomi Daerah

Disusun dan diajukan oleh :

AFANDI NUR, S.TP

P022201020

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**STUDI PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP KINERJA
MELALUI EFISIENSI PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

AFANDI NUR

P022201020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 02 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hamka Naping, MA
Nip. 19611041987021001

Andi Reni, SE, M.Si., Ph.D
Nip. 196412311990112001

Ketua Program Studi,
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Andang Suryana Soma, S.Hut., M.P., Ph.D
Nip. 197803252008121002

Prof. dr. E. J. J. Ph.D., SP.M(K), M.Med.Ed
Nip. 196412311995031009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Afandi Nur, S.TP

Nomor mahasiswa : P022201020

Program studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Enrekang, 30 Desember 2022

Yang menyatakan



Afandi Nur, S.TP

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, petunjuk, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja Melalui Efisiensi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang**”. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 'jazakumullah *khairan katsiran*' kepada:

1. Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. dr. Budu Ph.D., Sp.M(K), Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Andang Suryana Soma, S.Hut., M.P.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamka Naping, MA dan Andi Reni, SE.,M.Si.,Ph.D, selaku komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng serta Dr. Abd Rasak Munir, SE., M.Si., M.Mktg sebagai dosen penguji yang senantiasa meluangkan waktu memberikan masukan demi perbaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Ayahanda (alm)H. Ali Rahman., dan Ibunda (almh) Hj. Masturah, Bapak mertua Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE., MM. dan ibu mertua Dra. Hj. Rina Sari Larasatie M.Si, dan seluruh keluarga besar terima kasih atas segala doa dan dukungan, kebersamaan, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan.
5. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Enrekang Ayahanda Drs.H.Muslimin

Bando, M.Pd dan Ibunda Dra.Hj. Johra Muslimin Bando, M.Pd yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada kami mahasiswa S2 PPW OTDA.

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Andi Sapada, S.IP., M.Si dan seluruh staff yang mendukung dan membantu proses penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
7. Kepada Saudara/saudariku seperjuangan pada Pasca Sarjana Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah UNHAS Angkatan 2020, terima kasih atas bantuan, motivasi, persaudaraan, kebersamaannya selama ini.
8. Kepada Istriku tercinta Almarhumah Siti Farisya Mahardikasari, SP., M.Si yang mendampingiku walaupun hanya dalam waktu singkat selama 13 tahun yang selalu memotivasiku,InshaAllah janjiku untuk menyelesaikan kuliah S2 ini akan saya tepati serta anakku Muhammad Akhtar Mukti Alfath dan Muhammad Arkananta Tunggakencana, terimakasih atas dukungan dan pengertiannya sehingga saya tetap semangat menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan tesis ini namun tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya
10. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, 22 Juni 2023



Afandi Nur, S.TP

Abstrak

AFANDI NUR. “Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja Melalui Efisiensi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang”. (dibimbing oleh Hamka Naping dan Andi Reni).

Infrastruktur teknologi yang terbatas, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, resistensi perubahan, keamanan dan perlindungan data dan penyesuaian dengan peraturan dan kebijakan adalah sebagian masalah dalam penerapan E-Procurement terhadap kinerja. Dengan demikian penting untuk mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi dan memastikan penerapan E-Procurement agar berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap kinerja melalui efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah cara teknik sampling jenuh, artinya keseluruhan populasi menjadi sampel. Populasinya berjumlah 44 responden diambil dari data keseluruhan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif (TCR), uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi sederhana, uji regresi linier berganda, path analysis, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial: penerapan *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap kinerja; dan efisiensi pengadaan. Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sedangkan secara simultan penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Kemampuan variabel Penerapan *E-Procurement* (X) dalam mempengaruhi variabel Kinerja (Y) melalui variabel Efisiensi Pengadaan (Z) sebesar 54,7%. Sedangkan sisanya sebesar 45,3% (100% - 54,7%) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian. Artinya jika semakin meningkat penerapan *e-procurement*, maka semakin meningkat juga nilai kinerja melalui efisiensi pengadaan.

Kata Kunci: Penerapan *E-Procurement*; Kinerja; Efisiensi Pengadaan

Abstract

AFANDI NUR. “*Study of the Effect of E-Procurement Implementation on Performance Through the Efficiency of Procurement of Construction Work at Public Works Department of Enrekang Regency*”. (dibimbing oleh Hamka Naping dan Andi Reni).

Limited technological infrastructure, limited knowledge and skills, resistance to change, security and data protection, and compliance with regulations and policies are some of the problems in implementing E-Procurement for performance. Thus it is important to identify and understand these problems to be able to take appropriate steps in overcoming and ensuring the implementation of E-Procurement runs well. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of e-procurement on performance through the efficiency of the procurement of construction work at Public Works Department of Enrekang Regency. The sampling technique used is saturated sampling technique, meaning that the entire population is sampled. The population is 44 respondents taken from the civil servant general data. The analysis technique used is descriptive statistical test (TCR), validity test, reliability test, normality test, simple correlation test, multiple linear regression test, path analysis, coefficient of determination test, F test and t test. The results show that partially: the implementation of e-procurement has a significant effect on performance; and procurement efficiency. Efficiency has a significant effect on performance. Meanwhile, simultaneously the implementation of e-procurement has a positive and significant effect on performance through the efficiency of procurement of construction work at the Public Works Department of Enrekang Regency. The ability of the E-Procurement Implementation variable (X) to influence the Performance variable (Y) through the Procurement Efficiency variable (Z) is 54.7%. While the remaining 45.3% (100% - 54.7%) is explained by variables other than the independent variables in the study. This means that if the implementation of e-procurement increases, the value of performance through procurement efficiency will also increase.

Keywords: Application of E-Procurement; Performance; Procurement Efficiency

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Kajian Teori..... | 10 |
| 2.1.1. <i>Electronic Procurement</i> | 10 |
| 2.1.2. Kinerja | 18 |
| 2.1.3. Efisiensi Pengadaan..... | 26 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.3. Kerangka Pikir..... | 31 |
| 2.4. Defenisi Operasional..... | 33 |
| 2.5. Hipotesis | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian..... | 35 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 36 |
| 3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| 3.4. Populasi Dan Teknik Sampel | 36 |
| 3.4.1. Populasi Penelitian | 36 |
| 3.4.2. Sampel..... | 37 |
| 3.5. Instrumen Pengumpulan Data | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3.5.1. Kuesioner..... | 38 |
| 3.5.2. Dokumentasi | 38 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 38 |
| 3.6.1. Uji Validasi dan Reabilitas..... | 39 |
| 3.6.2. Analisis Statistik Deskriptif | 40 |
| 3.6.3. Uji Normalitas..... | 41 |
| 3.6.4. Uji Linearitas | 41 |
| 3.6.5. Analisis Regresi Linear Sederhana..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian | 44 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang | 44 |
| 4.1.2. Kondisi Geografi dan Administrasi | 45 |
| 4.1.3. Gambaran Umum Dinas PU Kabupaten Enrekang | 48 |
| 4.1.4. Gambaran Umum Pengelolaan E-Procurement..... | 55 |
| 4.2. Analisis karakteristik responden..... | 56 |
| 4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 57 |
| 4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 58 |
| 4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 59 |
| 4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja | 60 |
| 4.3. Hasil Uji Instrument Penelitian | 61 |
| 4.4. Uji Validasi | 61 |
| 4.4.1. Uji Validasi Penerapan <i>E-Procurement</i> (x)..... | 62 |
| 4.4.2. Uji Validasi Efisiensi Pengadaan (Z) | 64 |
| 4.4.3. Uji Validasi Variabel Kinerja (Y)..... | 66 |
| 4.5. Uji Realibilitas | 68 |
| 4.6. Analisis Statistik Deskriptif | 69 |
| 4.7. Uji Normalitas..... | 78 |
| 4.8. Uji Linearitas | 79 |
| 4.9. Analisis Regresi Linear Sederhana..... | 81 |
| 4.10. Path Analysis (Analisis Jalur) | 84 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 4.11. Koefisien Determinasi | 88 |
| 4.12. Uji F | 89 |
| 4.13. Uji T | 92 |
| 4.14. Pembahasan..... | 94 |
| BAB V PENUTUP | 112 |
| 5.1. Kesimpulan | 112 |
| 5.2. Saran | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.1 | Tingkat Capaian Responden..... | 41 |
| Tabel 4.1 | Luas Wilayah Kabupaten Enrekang | 47 |
| Tabel 4.2 | Uji Validasi Penerapan E-Procurement (X)..... | 63 |
| Tabel 4.3 | Uji Validasi Efisiensi Pengadaan (Z)..... | 65 |
| Tabel 4.4 | Uji Validasi Variabel Kinerja (Y)..... | 66 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji Realibility Variabel Penerapan E-Procurement (X); Efisiensi Pengadaan (Z) dan Kinerja (Y)..... | 69 |
| Tabel 4.6 | Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Penerapan E-Procurement (X)..... | 70 |
| Tabel 4.7 | Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Efisiensi Pengadaan (Z) | 72 |
| Tabel 4.8 | Tingkat Capaian Respondes (TCR) Variabel Kinerja (Y..)..... | 75 |
| Tabel 4.9 | Hasil Uji Normalitas Dengan Cara Shapiro-Wilk..... | 79 |
| Tabel 4.10 | HAsil Uji Linearitas Variabel E-Procurement (X) terhadap Kinerja (Y) | 80 |
| Tabel 4.11 | Hasil Uji Linearitas Variabel Efisiensi Pengadaan (Z) terhadap Kinerja (Y) | 80 |
| Tabel 4.12 | Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Penerapan E-Procurement (X) terhadap variable Efisiensi Pengadadan (Z)..... | 82 |
| Tabel 4.13 | Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Penerapan E-Procurement (X) terhadap variabel Kinerja (Y)..... | 83 |
| Tabel 4.14 | Path Analysis Koefisien Jalur Model I Variabel Penerapan E-Procurement (X) Terhadap Variabel Efisiensi Pengadaan(Z)..... | 85 |
| Tabel 4.15 | Path Analysis Koefisien Jalur Model II Variabel Penerapan E-Procurement (X) Terhadap Variabel Kinerja (Y)..... | 86 |
| Tabel 4.16 | <i>Path Analysis</i> Koefisien Jalur Model III Variabel Penerapan E-Procurement (X) Terhadap Variabel Kinerja (Y) melalui Efisiensi Pengadaan (Z)..... | 87 |
| Tabel | <i>Model Summary</i> | 89 |

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 4.17 | | |
| Tabel | Hasil Uji F (Simultan)..... | 91 |
| 4.18 | | |
| Tabel | Hasil Uji T (Parsial)..... | 92 |
| 4.19 | | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 32 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Enrekang..... | 48 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum | 50 |
| Gambar 4.3 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 57 |
| Gambar 4.4 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 58 |
| Gambar 4.5 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... | 59 |
| Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja..... | 60 |
| Gambar 4.7 Diagram jalur model struktur I..... | 85 |
| Gambar 4.8 Diagram jalur model struktur II | 86 |
| Gambar 4.9 Diagram jalur model struktur II | 88 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dapat dengan cepat menyambut dan beradaptasi terhadap perkembangan Teknologi dan Informasi (TI). Saat ini, hampir disegala sektor pelayanan publik telah mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga pada tahun 2003, pemerintahn mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebagai salah satu strategi pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

Menurut Heeks (2001), *e-government* lahir karena dua revolusi yaitu revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Kedua revolusi ini berdampak pada pola interaksi pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat dikelola. *E-government* adalah garda terdepan dari upaya pemerintah dalam menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, kelompok bisnis, pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat (Chen & Perry, 2003). Konsep dari *e-government* mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C)

Government to Citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B Government to Business Enterprises*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G Government to Governments Inter Agency elationship*). Salah satu bentuk penerapan dari e-government adalah *e-procurement* yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal ini merupakan wujud hubungan *government-to-bussiness (G2B)* dari penyedia barang atau jasa ke Instansi Pemerintah melalui internet. *E-procurement* juga merupakan wujud hubungan *citizen-to-government (C2G)* yaitu masyarakat mendapatkan akses untuk memantau proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi untuk mempermudah *business-to-business (B2B)* bertransaksi pembelian untuk bahan / barang dan jasa (Wu et al, 2007; Croom dan Jones, 2007). Perkembangan *e-procurement* di Indonesia dimulai sejak tahun 2004 dengan mengacu *business process* yang tertuang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, selanjutnya direvisi sebagian kecil dari aturan sebelumnya menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Presiden

No 16 Tahun 2018 dan yang terbaru Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lahirnya Perpres ini menjadi instruksi wajib semua Kementerian, LNPD (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Perangkat Daerah dan instansi lain untuk menggunakan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

E-procurement merupakan kegiatan instansi dalam pengadaan barang mulai dari pelelangan, penawaran sampai penentuan pemenang yang dilakukan secara elektronik. Penerapan aplikasi *e-procurement* diharapkan dapat membantu mewujudkan *good and clean governance*, yaitu pemerintahan yang baik, transparan, bertanggung jawab pada kinerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.

Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang, berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, hal ini dilakukan melalui usaha organisasi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi berbasis *e-procurement*. Tujuan peningkatan kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi berbasis *e-procurement* yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan, yang diselenggarakan secara bertanggung jawab dan bersih sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 207/PRT/M/2005 tentang *e-procurement* menjelaskan bahwa penerapan pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik di lingkungan instansi Pemerintah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal /Sekretaris Menteri / Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah yang antara lain berisi penetapan sistem aplikasi *e-procurement* yang akan digunakan, administrator sistem tugas dan peran pihak-pihak yang terkait serta tahapan penerapannya dengan memperhatikan kesiapan sumber daya di lingkungan masing-masing instansi. Pada tahun 2021, tercatat ada 121 jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang untuk tahun anggaran 2021 (LPSE Enrekang, 2021). Tentu hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang untuk bekerja secara maksimal agar kinerja dan nilai efisiensi pengadaan dapat meningkat melalui proses *e-procurement*.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang, seringkali masalah kinerja sumber daya manusia dan efisiensi baik anggaran maupun waktu menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai harapan. Fenomena kinerja pegawai dapat dideskripsikan, bahwa sebenarnya para pegawai memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam bekerja, tetapi tingkat konsistensi dan kedisiplinan dalam penyelesaian pekerjaan

tepat waktu yang masih rendah, sehingga menggambarkan kualitas kinerja juga kurang optimal.

Selain itu, sebelum sistem pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang dilakukan melalui sistem *e-procurement*, beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja dan kendala yang muncul tersebut dapat dilihat dari tingkat seberapa efisien dalam pengadaan barang dan jasa secara manual. Pegawai yang menengani lelang pengadaan barang dan jasa harus memiliki rekapan data dari semua penyedia jasa (badan usaha) dalam bentuk dokumen – dokumen.

Kegiatan secara konvensional/manual ini sangat memungkinkan menghambat peningkatan capaian kinerja dan efisiensi pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang. Begitu juga, permasalahan yang dihadapi saat ini seperti kelemahan dalam perencanaan terutama pekerjaan konstruksi dengan perencanaan dilaksanakan dalam tahun anggaran bersamaan; adanya kondisi darurat terkait dengan *Covid-19*; dan adanya rasionalisasi anggaran berdampak pada penundaan beberapa paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang merupakan satu kesatuan tahapan pekerjaan.

Menurut Dwiyanto (2006), kinerja merupakan suatu hasil kerja yang telah tercapai dalam menangani suatu pengadaan barang atau jasa dalam suatu instansi atau organisasi. Sedangkan pengukuran

kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal (Muhmudi, 2019:60).

Menurut Wijaya (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *e-procurement* berpengaruh terhadap kinerja meliputi pemusatan manajemen yang lebih baik, menciptakan proses pengadaan yang bersih transparan dan dapat diterima dan meningkatkan kepuasan *client customer satisfaction*. Sedangkan efisiensi pengadaan meliputi mengurangi biaya per *tender Cost per Tender* dan mengurangi waktu proses pengadaan.

Berangkat dari uraian permasalahan pada paragraf di atas, maka peneliti memandang sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul "**Studi Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kinerja Melalui Efisiensi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang**".

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap kinerja pada pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?
2. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan pada pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?
3. Apakah efisiensi pengadaan berpengaruh terhadap kinerja pada pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?
4. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap kinerja melalui efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-procurement* terhadap kinerja pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-procurement* terhadap efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi terhadap kinerja pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-procurement* terhadap kinerja melalui efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan konseptual dan kontekstual, serta manfaat praktis untuk memperbaiki bagi organisasi yang bersangkutan. Manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif pengembangan pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi sumbangan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan, khususnya mengenai pengaruh *e-procurement* terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi materi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai pengaruh *e-procurement* terhadap

kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. *Electronic Procurement*

a. Definisi *E-Procurement*

Electronic Procurement atau sering disingkat *e-procurement* merupakan sistem atau aplikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-procurement* adalah salah satu produk dari *e-government*. Kehadiran *e-procurement* merupakan sebuah inovasi dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diistilahkan dengan konsep *good governance*. *E-procurement* ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti menjunjung nilai transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas.

Secara garis besar, para ahli memiliki persepsi yang sama terhadap definisi *e-procurement*. Djoyosoekarto (2008:10) mengidentifikasikan *e-procurement* sebagai pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian. Davila et al., (2003) menambahkan definisi tentang *e-procurement* yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet.

Begitu juga menurut Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan

penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Selain itu Tatsis et al., (2006) juga mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomatisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web.

Senada dengan pendapat Sutedi (2012:254), mengatakan bahwa *e-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Willem (2012:80) juga menambahkan jika *e-procurement* adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI).

Definisi e-procurement dari beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan *e-procurement* adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah berbasis elektronik.

b. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

E-Procurement merupakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Muhtar (2011). Sistem ini mencoba menata transaksi proses pelelangan melalui media

teknologi, seperti diketahui proses pelelangan jasa serta barang dilaksanakan secara daring. Landasan legitimasi untuk menjalankan program *E-Procurement* (Pengadaan secara online dan/atau melalui teknologi (elektronik) yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 sebagai revisi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada masing-masing Departemen, Kementerian, Organisasi serta aparatur daerah yang menggunakan sistem layanan ini.

Sasaran implementasi penyelenggaraan sistem *E-Procurement* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan kecanggihan teknologi serta melakukan transaksi elektronik.
- 2) Peningkatan profesionalisme, kemandirian serta rasa pertanggungjawaban pihak-pihak yang ada didalam implementasi pelelangan barang/jasa.
- 3) Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di masing-masing instansi satuan kerja untuk membantu tercapainya *reward* dan *punishment*

terhadap pelayanan yang baik dalam memperadakan barang dan jasa.

c. Tipe *e-procurement*

Menurut Turban et al (2012) ada enam tipe *e-procurement*, diantaranya:

- 1) *E-sourcing*: mengidentifikasi pemasok baru untuk kategori specific pada kebutuhan pembelian dengan menggunakan teknologi internet.
- 2) *E-tendering*: Mengirimkan permintaan untuk informasi dan harga ke pemasok dan menerima jawaban dari pemasok dengan teknologi internet.
- 3) *E-reverse auction*: Menggunakan teknologi internet untuk membeli barang dan jasa melalui sejumlah pemasok yang sudah dikenal maupun belum.
- 4) *E-informing*: mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian baik dari pihak internal maupun eksternal dengan menggunakan teknologi Internet.
- 5) *Web-based ERP (electronic resource planning)*: Membuat dan menyetujui permintaan kebutuhan pembelian, menetapkan pesanan pembelian, dan menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi internet.

- 6) *E-MRO (maintenance, repair dan operationg)*: sama seperti *Web-based ERP* kecuali barang dan jasa yang diorder adalah produk yang tidak berhubungan dengan pemasok MRO.

d. Proses Tipe *e-procurement*

Proses pengadaan seperti yang dijelaskan oleh Chaffey (2009) pada dasarnya dimulai dari:

- 1) Fungsi perencana menentukan barang yang dibutuhkan.
- 2) Fungsi perencana mengisi formulir permintaan lalu diserahkan kepada buyer pada departemen pembelian. Manajer di departemen pembelian mengesahkan formulir pembelian.
- 3) Buyer mengisi formulir pemesanan lalu dikirim ke pemasok
- 4) Pemasok menerima pesanan lalu pesanan tersebut dikirim
- 5) Barang pesanan diperiksa apakah sudah sesuai dengan formular pemesanan dan tagihan pekerjaan yang dibuat oleh supplier
- 6) Tagihan dibayarkan kepada supplier

Sedangkan menurut Turban et al. (2012) alur proses *e-procurement* sebagai berikut:

- 1) Mencari vendor dan produk yang diinginkan dengan menggunakan ekatalog, brosur, telepon, kunjungan langsung, dan lain-lain.

- 2) Melakukan kualifikasi vendor dilakukan memilih vendor yang dapat diajak bekerja sama demi keperluan pengadaan organisasi.
- 3) Pemilihan vendor dapat dilakukan pencarian informasi tentang vendor apakah sesuai dengan spesifikasi.
- 4) Memilih mekanisme pasar, seperti private, umum, lelang, barter, dan lain-lain.
- 5) Melakukan perbandingan serta negosiasi mengenai kualitas barang, harga barang, metode pengiriman, dan lain-lain.
- 6) Membuat kesepakatan kontrak untuk pembelian setelah negosiasi berhasil.
- 7) Membuat *Purchase Order* (PO).
- 8) Mengatur jadwal pengambilan atau pengiriman barang, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk sebelumnya.
- 9) Melakukan pembayaran kepada vendor.

Menurut Quesada et al (2010) proses berjalannya pengadaan sesuai dengan prakteknya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pengumpulan Informasi.
- 2) Kontak Pemasok.
- 3) *Contracting*.
- 4) *Requisitioning*.

5) *Requisitioning*

6) Intelegensi dan analisis.

e. Tujuan dan Manfaat *E-Procurement*

Tujuan *E-Procurement* menurut Suparman (2014) yaitu bukan untuk menghasilkan barang/jasa yang mengutamakan keuntungan, tetapi bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik. Airlangga (2010) menyebutkan tujuan *e-Procurement*, yaitu: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Sedangkan manfaat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui *e-procurement* dapat mencerminkan keterbukaan atau transparansi dan juga meminimalisir praktik curang (KKN) dalam lelang pengadaan barang dan jasa, karena proses lelang berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (Sutedi,2012:254). Giri (2009:36) menambahkan manfaat lainnya seperti:

- 1) *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
- 2) *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
- 3) *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
- 4) *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.
- 5) *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori e-procurement juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
- 6) *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi.

Penyelenggaraan *e-Procurement* di Kementerian Pekerjaan Umum awalnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran karena adanya tuntutan reformasi dari publik, yang kemudian berkembang untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memperlancar dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Dengan proses lelang yang cepat maka semakin cepat juga pekerjaan dapat diselesaikan dan semakin cepat pula manfaat dari infrastruktur ke-PU-an tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat (Sumadilaga & Pudjijono, 2011).

2.1.2. Kinerja

Setiap perubahan dalam proses atau teknologi harus memiliki dampak positif pada kinerja organisasi. *E-procurement* memiliki beberapa implikasi untuk perbaikan proses tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perbaikan ini, mempengaruhi kinerja dan efisiensi organisasi baik secara finansial dan non-finansial.

Definisi kinerja sebenarnya memiliki banyak arti dan dikaitkan kegunaannya dengan ketenagakerjaan baik dari individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja merupakan penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi (Ilyas, 2001).

Sedangkan menurut Amstrong (2004) kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati. Dengan kata lain kinerja dapat didefinisikan sebagai penampilan seseorang atau kelompok yang memiliki tanggung jawab sesuai jabatan pekerjaannya untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan strategi yang dibentuk dalam organisasi.

Teo dan Lai (2009) menggambarkan pengaruh tingkat penggunaan *e-procurement* pada kinerja dengan menggunakan faktor penentu, yaitu:

1) *Impact on cost reduction*

Dengan menggunakan *system e-procurement* memungkinkan untuk memilih pemasok dan memberikan nilai terbaik. Sehingga

terjadi penurunan unit biaya, biaya pengadaan bahan, biaya transaksi, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan dokumen.

2) *Internal efficiency*

Adanya pengurangan waktu siklus pengadaan, meningkatkan respon untuk produksi dan kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan akurasi rencana kapasitas produksi, serta mengotomatisasi proses persetujuan.

3) *Managerial effectiveness*

Menjadikan pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap akurasi dan kecepatan, penggunaan sumber daya yang lebih baik, dan visibilitas yang lebih tinggi. Selain itu koordinasi lintas-fungsional meningkat karena adanya keterkaitan secara elektronik dengan fungsi pembelian.

4) *Impact coordination*

Manajemen hubungan rantai pasokan dan koordinasi dengan mitra bisnis menjadi lebih baik .

Menurut Robertson (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sejalan dengan ini, Kumorotomo

(Sudarmanto, 2009) merumuskan 4 indikator penilaian terhadap kinerja organisasi, yaitu:

- 1) Efisiensi: menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
- 2) Efektivitas: menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
- 3) Keadilan: menyangkut distribusi dan alokasi layanan diselenggarakan organisasi pelayanan publik. kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercakupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi.
- 4) Daya tanggap: daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kinerja organisasi menurut Kalika et al., (2003) dinilai secara multidimensi menggunakan perspektif dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Produktifitas berdasar pengaruh pemanfaatan sistem/teknologi informasi terhadap produktifitas anggota organisasi. Ini

menunjukkan bahwa tingkat produktifitas anggota organisasi didukung dan didorong dengan pemanfaatan sistem/teknologi informasi.

- 2) Pengurangan biaya (*cost reduction*) yakni penghematan yang diperoleh berdasar pemanfaatan sistem/teknologi informasi. Adanya sistem/teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada pengurangan biaya. Pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual yang membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup banyak. Dengan adanya pemanfaatan sistem/teknologi informasi dapat dilakukan oleh beberapa orang dan waktu yang relatif singkat.
- 3) Kemampuan melakukan inovasi yang bernilai tambah melalui pemanfaatan sistem/teknologi informasi. Adanya teknologi akan memunculkan dan menambah inovasi dalam organisasi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan keunggulan kompetitif, tetapi juga menciptakan nilai tambah baru pada organisasi mulai dari tingkat sub unit sampai organisasi.
- 4) Kemampuan reaktifitas organisasi dalam menyikapi dan memanfaatkan peluang peluang bisnis yang ada. Dengan sistem/teknologi informasi reaktifitas dan peluang organisasi terhadap bisnis semakin tajam. Reaktifitas dan peluang tersebut juga terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga

keputusan yang dibuat terkait dengan aktivitas bisnis yang dijalankan juga berjalan dengan cepat.

- 5) Tingkat respon terhadap kebutuhan pelanggan, apakah sistem/teknologi informasi dapat menjamin adanya pemahaman dan pemenuhan terhadap ekspektasi pelanggan yang lebih baik. Dengan adanya e-mail dan website perusahaan, maka kebutuhan pelanggan serta keluhan terkait aktivitas bisnis yang dilakukan oleh organisasi dapat direspon secara cepat dan tepat.
- 6) Hubungan kolaborasi terhadap mitra-mitra bisnis melalui tingkat pergeseran hubungan perusahaan terhadap mitra strategis dari pesaing menuju kolaborasi. Adanya sistem/teknologi informasi mau tidak mau suka tidak suka akan menggeser hubungan antara mitra bisnis. Pergeseran dari pesaing menjadi kolaborasi akan meningkatkan keunggulan kompetitif serta peningkatan kinerja organisasi

Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto (2006 : 50) yaitu sebagai berikut :

- 1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

2) Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

3) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan

sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006), karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Lima indikator tersebut meliputi: produktivitas; kualitas layanan; responsivitas; responsibilitas dan akuntabilitas.

2.1.3. Efisiensi Pengadaan

Secara umum pengertian efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya. Agar memahami apa arti efisiensi kerja kita dapat merujuk pada para ahli berikut ini adalah pengertian efisiensi menurut Susilo,(2011:28) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang di miliki.

Menurut Soekartawi (2010:220) efisiensi kerja adalah upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Perbandingan ini dilihat dari:

- 1) Segi waktu , suatu pekerjaan disebut lebih efisien bila hasil kerja berdasarkan patokan ukuran yang diinginkan untuk memperoleh sesuatu yang baik dan maksimal.
- 2) Segi kinerja, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Berbeda dengan Wicaksono dkk (2010) menurutnya efisiensi dapat diukur dengan indikator seperti efisiensi biaya; efisiensi waktu; dan efisiensi jumlah personil. Sedangkan Zainudin (2012:16) menjelaskan bahwa efisiensi dalam konteks pengeluaran publik (belanja pemerintah) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, dan efisiensi alokatif.

Menurut Mardiasmo (2009), indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Menurut Mulyadi (2007 : 67) efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-

sama menilai variabel input terhadap output. Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi *output* terhadap *input*, sedangkan efisiensi adalah *input* dibagi dengan *output*.

Ada beberapa syarat tolak ukur efisiensi yang baik menurut Riani (2011:98), yaitu:

- 1) Tolak ukur yang baik haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya. Konsep keandalan pengukuran mempunyai dua komponen, yaitu stabilitas dan konsistensi. Stabilitas menyiratkan bahwa pengukuran yang dilakukan pada waktu yang berbeda haruslah mencapai hasil yang kira-kira serupa. Konsistensi menyiratkan bahwa pengukuran kriteria yang dilaksanakan dengan menggunakan metode yang berbeda atau orang yang berbeda haruslah mencapai hasil yang kira-kira sama.
- 2) Tolak ukur yang baik adalah harus sensitif terhadap masukan dan tindakan-tindakan dari pemegang jabatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk penelitian ini.

a. LIA HERIAWATI (2018)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Barang/Jasa

Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Barang/Jasa sebesar 34,61 %. Kemudian *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Barang/Jasa sebesar 10,06 %. Sedangkan Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Barang/Jasa sebesar 44,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan *E-Procurement* dan *Good Governance*, maka akan semakin meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Persamaan penelitian Lia Heriawati dengan rencana penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus yang sama bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap kinerja barang dan jasa. Hanya saja yang membedakan, penelitian terdahulu ini menggunakan dua variabel X yaitu *E-Procurement* dan *Good Governance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan hanya memfokuskan pada penerapan *E-Procurement* terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di dinas PU Kabupaten Enrekang.

- b. Leny Diah Astari, Mualifatul Dalatululum, Nia Kurniasih, Novita Devi Indahsari (2020)

Judul artikel Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Temuan yang diperoleh yaitu penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Surabaya telah berjalan secara efisien. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai penghargaan yang diterima dan mampu memenuhi kriteria efisiensi, yang meliputi *man, money, material, mechine, methode, marketing, minutes and information*. Penerapan *e-procurement* merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dimana mereka menginginkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diperoleh serta terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis yaitu memiliki fokus penelitian mengenai penerapan *e-procurement* terhadap nilai efisiensi. Tetapi, penelitian ini melihat dengan perspektif kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Sedangkan, penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus yang lebih detail yaitu penerapan *E-Procurement* terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di dinas PU Kabupaten Enrekang.

- c. Quesada,G., Gonzales M.E., Mueller J., Mueller R. (2010).

Judul penelitian yaitu *Impact of e-procurement on procurement practices and performance*. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-procurement Technology* (EPT) berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Structural Equation Model*. Berbeda dengan rencana penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data dibantu dengan aplikasi SPSS.

Dari beberapa penelitian terdahulu, tidak terdapat penelitian yang fokus membahas Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas PU Kabupaten Enrekang. Pada penelitian terdahulu yang pertama dan ketiga hanya fokus melihat pengaruh *E-Procurement* terhadap kinerja, begitu juga pada penelitian terdahulu yang ke dua. Titik fokus analisisnya hanya melihat pengaruh *E-Procurement* terhadap efisiensi pengadaan.

2.3. Kerangka Pikir

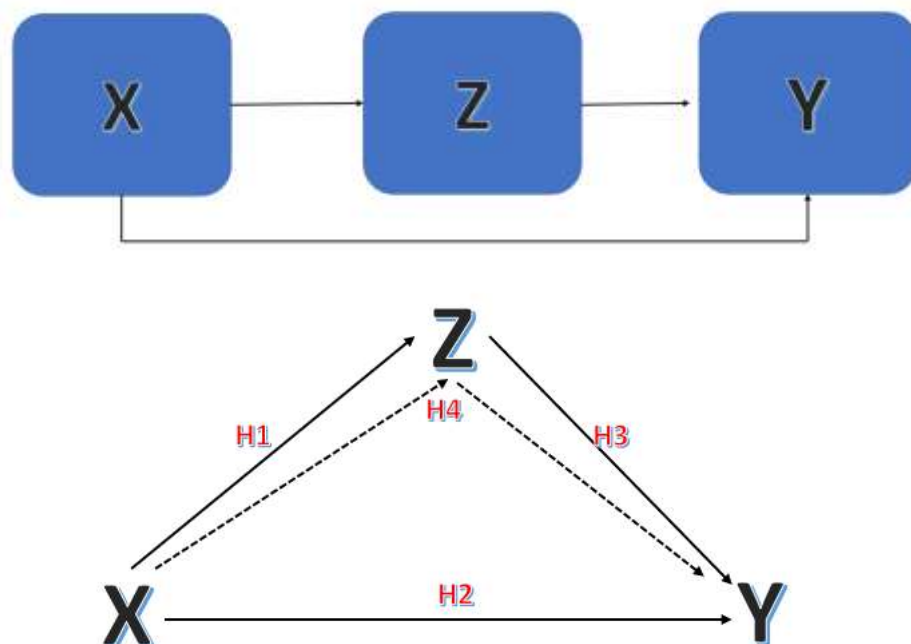
Pada penelitian ini variabel independent (X) adalah penerapan *E-Procurement*, indikator yang digunakan menurut Turban et al (2012) yaitu *E-sourcing; E-tendering; E-reverse auction; E-informing; Web-based ERP (electronic resource planning); dan E-MRO (maintenance, repair dan operationg)*.

Terdapat dua Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja (Y1) dan Efisiensi (Y2). Indikator kinerja mengacu pada Dwiyanto (2006), karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Lima indikator tersebut meliputi: produktivitas; kualitas layanan; responsivitas; tanggung jawab dan akuntabilitas. Sedangkan indikator efisiensi yang dimaksud yaitu efisiensi biaya; efisiensi waktu; dan efisiensi jumlah personil (Wicaksono dkk, 2010).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di dinas PU Kabupaten Enrekang. Berikut alur kerangka pikir penelitian:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan abstraksi dari objek penelitian, sehingga dalam realitasnya diperlukan konsep yang lebih operasional untuk dapat memfokuskan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel Penerapan *E-Procurement* (X), meliputi:
 - 1) *E-sourcing*;
 - 2) *E-tendering*;
 - 3) *E-reverse auction*;
 - 4) *E-informing*;
 - 5) *Web-based ERP (electronic resource planning)*; dan
 - 6) *E-MRO (maintenance, repair dan operationg)*.
- b. Variabel Efisiensi Pengadaan (Z), meliputi:
 - a) Efisiensi biaya;
 - b) Efisiensi waktu; dan
 - c) Efisiensi jumlah personil
- c. Variabel Kinerja (Y), meliputi:
 - a) Produktivitas;
 - b) Kualitas layanan;
 - c) Responsivitas;
 - d) Responsibilitas dan
 - e) Akuntabilitas

2.5. Hipotesis

Berdasarkan asumsi-asumsi penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hubungan Langsung:

H₁ : Diduga ada pengaruh penerapan *e-procurement* (X) terhadap efisiensi pengadaan (Z) pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. $X \longrightarrow Z$

H₂ : Diduga ada pengaruh penerapan *e-procurement* (X) terhadap kinerja (Y) pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. $X \longrightarrow Y$

H₃ : Diduga ada pengaruh efisiensi pengadaan (Z) terhadap kinerja (Y) pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. $Z \longrightarrow Y$

Hubungan Tidak Langsung:

H₄ : Diduga ada pengaruh penerapan *e-procurement* (X) terhadap kinerja (Y) melalui efisiensi pengadaan pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. $X \longrightarrow Z \longrightarrow Y$